

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok perdesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara yaitu pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni dengan melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJPD Tahun 2005 – 2025, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Jawa Tengah.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif,

merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 s/d 2018 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Diskominfo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 96).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan statistik, persandian, komunikasi dan informatika yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang.

BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu tugas pokok Diskominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah seperti tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Melalui Pergub tersebut terbentuk UPT Dinas yaitu :

1. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kelas A (Set KPID) dengan tugas pokok adalah membantu Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran, dan kerjasama dan pengembangan;
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kelas B (LPSE) dengan tugas pokok adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.

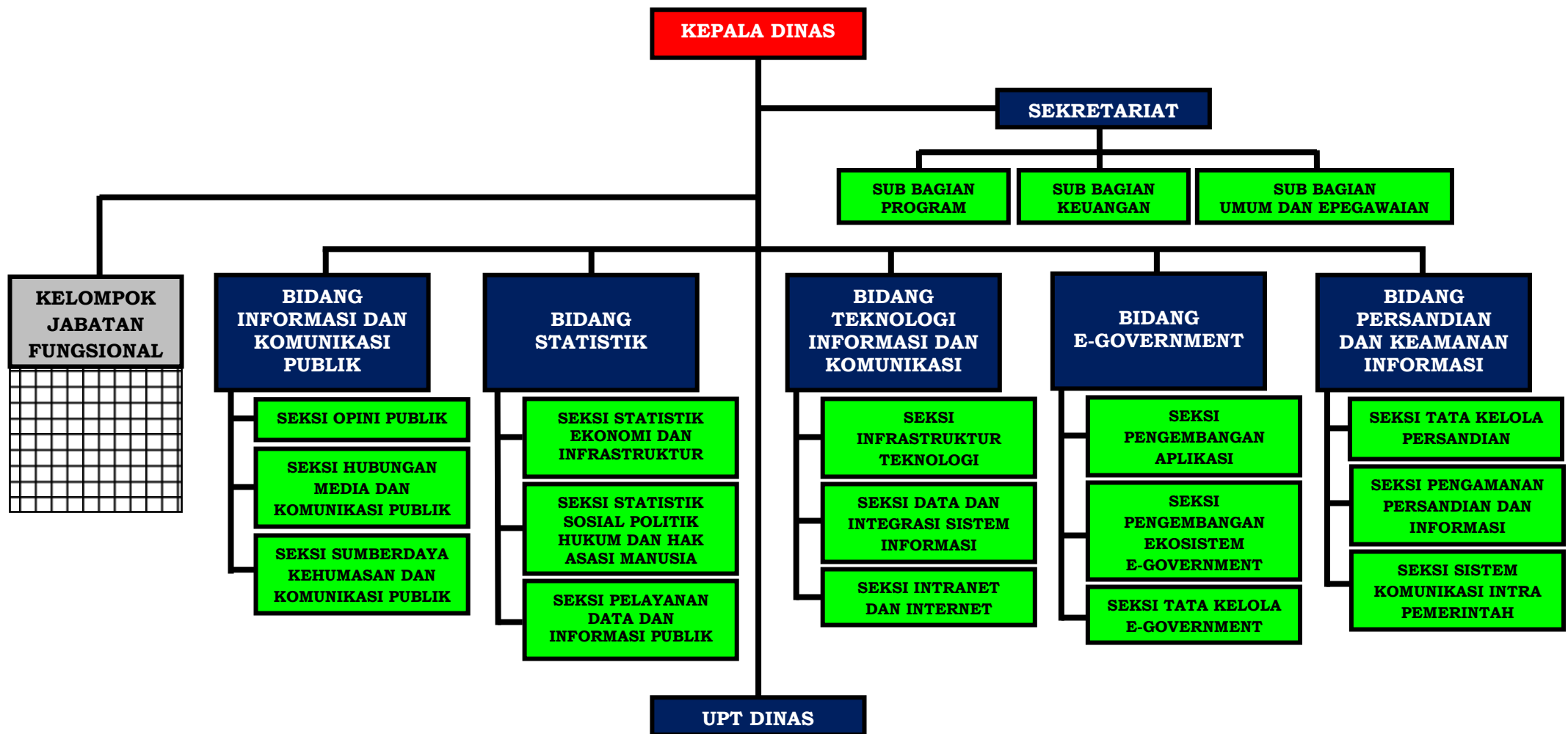
Kemudian kedua UPT tersebut memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Set KPID mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan lembaga penyiaran;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan lembaga penyiaran;
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan lembaga penyiaran;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. LPSE mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

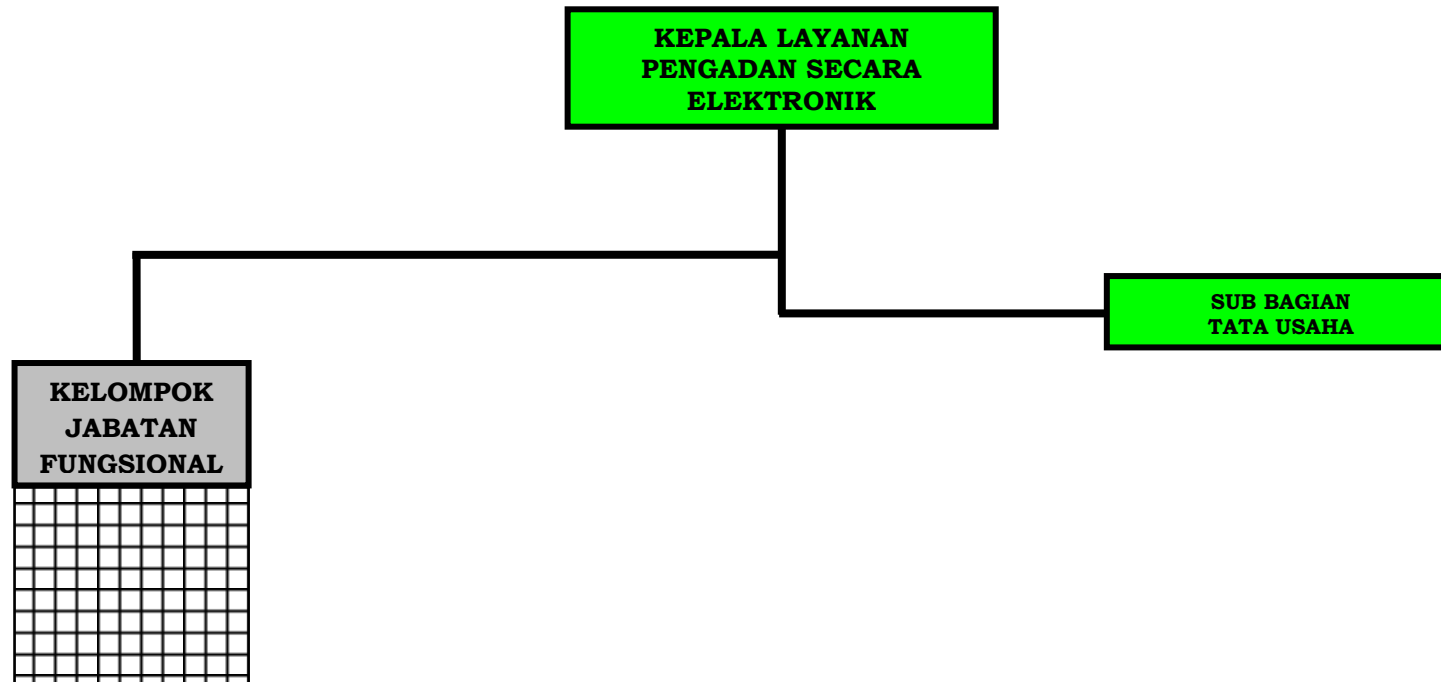
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Diskominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Statistik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang E-Government, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dsikominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kelas A



Gambar 2.3
Struktur Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kelas B

Sebagaimana Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program;

- 2) Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- 3) Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik, serta Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Opini Publik, Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik, Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik, dengan tugas :

- 1) Seksi Opini Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik;
- 2) Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik;

- 3) Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik.

3. Bidang Statistik

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Statistik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur; Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia; Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik; dengan tugas :

- 1) Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan infrastruktur;

- 2) Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan data dan informasi publik.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi, serta internet dan intranet.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi, Seksi Internet dan Intranet, dengan tugas :

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;

- 2) Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi : mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan integrasi sistem informasi;
- 3) Seksi Internet dan Intranet : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet.

5. Bidang E-Government

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem *E-Government* dan tata kelola *E-Government*.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem *E-Government*;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *E-Government*;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang *E-Government* terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pengembangan Aplikasi, Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*, Seksi Tata Kelola *E-Government*, dengan tugas :

- 1) Seksi Pengembangan Aplikasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
- 2) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government* : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem *E-Government*;

- 3) Seksi Tata Kelola E-Government : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *E-Government*.

6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi terdiri atas 3 seksi yaitu Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi, Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah, dengan tugas :

- 1) Seksi Tata Kelola Persandian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
- 2) Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;

- 3) Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah.

7. UPT Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 UPT Diskominfo dibentuk terdiri atas :

1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

a. Tugas:

Membantu Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan.

b. Fungsi:

- Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan lembaga penyiaran;
- Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan lembaga penyiaran;
- Evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan lembaga penyiaran;
- Pengelolaan ketatausahaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha, Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran, Subbagian Kerjasama dan Pengembangan, dengan tugas :

- Subbagian Tata Usaha : melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan;

- Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran : melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran;
- Subbagian Kerjasama dan Pengembangan : melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan fasilitasi di bidang Kerjasama dan Pengembangan.

2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik

a. Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.

b. Fungsi:

- Penyusunan rencana teknis operasional di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- Evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- Pengelolaan ketatausahaan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas 1 (satu) Subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Januari 2017, tercatat sebanyak 237 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Januari 2017 sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SAR MUD	S-1	S-2	S-3	
1.	Sekretariat	-	-	12	3	24	7	-	46
2.	IKP	-	-	1	-	8	3	-	12
3.	Statistik	-	-	3	1	8	3	-	15
4.	TIK	-	-	1	1	5	6	-	13
5.	E-Gov	-	-	-	-	7	4	-	11
6.	Persandian dan KI	-	-	9	1	7	2	-	19
7.	Set KPID	-	-	6	-	10	1	-	17
8.	LPSE	-	-	-	-	2	3	-	5
9.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Non PNS	1	-	30	10	58	-	-	99
Jumlah (Orang)		1	-	62	16	129	29	-	237
Persentase (%)		0,42	-	26,16	6,75	54,43	12,24	-	100

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1 (80,59%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin
(Januari Tahun 2017)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	18	28	46
2	IKP	5	7	12
3	Statistik	9	6	15
4	TIK	10	3	13
5	E-Gov	6	5	11
6	Persandian dan KI	12	7	19
7	Set KPID	7	10	17
8	LPSE	5	-	5
9	Fungsional Tertentu	-	-	-
10	Non PNS	77	22	99
Total (Orang)		149	88	237
Persentase (%)		62,87	37,13	100

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang IKP dan Set KPID.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah kondisi Januari 2017 terbanyak adalah pegawai Golongan III (76,08%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	5	39	2	46
2.	IKP	-	10	2	-	12
3.	Statistik	-	3	9	3	15
4.	TIK	-	1	10	2	13
5.	E-Gov	-	-	8	3	11
6.	Persandian dan KI	-	1	17	1	19
7.	Set KPID	-	-	16	1	17
8.	LPSE	-	-	4	1	5
9.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-
10.	Non PNS	-	-	-	-	-
Jumlah (Orang)		-	20	105	13	138
Persentase(%)		-	14,50	76,08	9,42	100

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KETERANGAN
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
1	Meja	248	86	35	369	meja kerja, pimp.dst
2	Kursi	396	138	41	575	kerja/rapat, lipat, putar
3	Meja-Kursi Tamu/Sofa	17	8	13	38	
4	Lemari / Rak	126	42	20	188	kayu, besi, kaca
5	Filling Cabinet	55	13	8	76	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG			TOTAL	KETERANGAN
		DISKOMINFO	KPID	KIP		
6	PC Unit / CPU (printer-scanner)	85	51	21	157	
7	Kulkas	2	2	-	4	
8	AC	46	45	30	121	split dan unit
9	Exhaust Fan / kipas angin	10	6	2	18	
10	Televisi	14	52	17	83	
11	Laptop	3	7	5	15	
12	Pesawat Telepon	13	10	14	37	
13	Faxcimile / PABX	2	2	4	8	
14	Komputer Touch Screen / TV tablet	2	-	-	2	E-Gov dan Lobby lt.1
15	1 unit Sound System	3	2	1	6	
16	Mesin Ketik manual	2	1	-	3	
17	Mesin Ketik Elektronik	-	5	-	5	
18	UPS / Stabilisator	4	22	-	26	
19	LAN /Internet/server/modem	5	1	-	6	
20	Mesin foto copy	1	2	-	3	
21	Layar monitor slide	5	-	-	5	
22	LCD Proyektor	3	1	-	4	
23	Kendaraan roda dua	-	4	-	4	
24	Kendaraan roda empat	8	6	7	21	termasuk 2 Bus

2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo

Gambaran kinerja Diskominfo tiga tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah*

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika												
1.1	<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>												
a.	Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)	-	-	-	3 k/k	5 k/k	5 k/k	3 k/k	2 k/k	5 k/k	100%	40%	100%
1.2	<i>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</i>												
a.	Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku	-	-	-	70%	75%	80%	70%	75%	80%	100%	100%	100%
b.	Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c.	SKPD bidang kominfo yang melakukan sosialisasi kebijakan nasional	-	-	-	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.3	<i>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</i>												
a.	Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo	-	-	-	5	5	3	8	4	7	160%	80%	233%
1.4	<i>Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</i>												
a.	Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Persentase SKPD yang telah mengupdate data di website-nya hingga tahun n-1	-	-	-	85%	90%	95%	94%	75%	100%	110%	83%	105%
2.	Urusan Statistik												
2.1	<i>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</i>												
	Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi												
a.	JDA	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%
b.	PDRB Provinsi	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%
c.	Tabel I-O	-	-	-	1 dok	-	-	1 dok	-	-	100%	100%	100%
d.	Tinjauan PDRB Kab/Kota	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan - Fungsi Lainnya												
3.1	<i>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>												
a.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan :

* = Indikator kinerja merupakan kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada fungsi lainnya yang sebelumnya ada pada OPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, OPD Sekretariat KPID, OPD Bappeda Provinsi Jawa Tengah, OPD Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dan OPD Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran Tahun			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika											
1.1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.011.756.000	10.671.595.000	8.299.731.000	7.881.613.920	8.946.502.434	7.859.446.268	87,46	83,83	94,70	(356.012.500)	(11.083.826)
1.2	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	7.908.996.000	9.445.586.000	7.895.255.000	6.503.854.205	7.814.753.610	6.532.436.388	82,23	82,73	82,74	(6.870.500)	14.291.092
1.3	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	465.000.000	400.035.000	316.500.000	404.093.805	359.748.030	277.577.500	86,90	89,93	87,70	(74.250.000)	(63.258.153)
1.4	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	486.418.000	699.750.000	-	442.207.500	260.896.400	-	90,91	37,28	349.875.000	130.448.200
2.	Urusan Statistik											
2.1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1.586.000.000	1.118.000.000	2.047.580.000	1.552.410.370	1.035.882.302	1.453.064.740	97,88	92,65	70,96	230.790.000	(49.672.815)
3.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan - Fungsi Lainnya											
3.1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	4.720.000.000	1.193.715.000	1.226.170.000	4.208.860.186	1.132.309.869	1.085.214.875	89,17	94,86	88,50	(1.746.915.000)	(1.561.822.656)
	T O T A L	23.691.752.000	23.315.349.000	20.484.986.000	20.550.832.486	19.731.403.745	17.468.636.171	86,74	84,63	85,28	(1.603.383.000)	(1.541.098.158)

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 (data diolah).

Catatan:

* = Indikator kinerja merupakan kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada fungsi lainnya yang sebelumnya ada pada OPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, OPD Sekretariat KPID, OPD Bappeda Provinsi Jawa Tengah, OPD Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dan OPR Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu dua tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat Jawa Tengah;
- b. Pesatnya perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;
- d. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Jawa Tengah terhadap TIK;
- e. Penyesuaian produk penyiaran dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS);
- f. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

2. Peluang

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
- d. Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai bagian dari OPD Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
- e. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berbasis elektronik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama kurun waktu tiga tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo yaitu:

1. Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional;
2. Jejaring informasi antar OPD Pemprov Jateng khususnya dalam memberikan *counter* terhadap pemberitaan negatif belum optimal;
3. Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial;
4. Pelaksanaan sosialisasi hasil pembangunan melalui FK Metra belum optimal;
5. Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
6. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
7. Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik;

8. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Program Kehumasan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Perlunya peningkatan jejaring komunikasi antara petugas kehumasan melalui Bakohumas;
10. Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi;
11. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
12. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral yang belum optimal;
13. Pembangunan aplikasi dengan *platform* dan struktur berbeda;
14. Pengelolaan pusat *application protocol interface* belum optimal;
15. Belum ada *masterplan* pengembangan TIK Jawa Tengah;
16. *Data centre* belum optimal;
17. Pengelolaan jaringan *internet* dan *intranet* di Jawa Tengah belum optimal;
18. Integrasi Sistem Informasi Jawa Tengah belum tercapai;
19. Kurangnya pedoman teknis terkait *E-Government*;
20. Sertifikasi keamanan informasi standar internasional belum terlaksana;
21. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian;
22. Kurangnya pemahaman, partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan isi siaran radio dan TV yang sehat dan bermartabat;
23. Kurangnya ketaatan lembaga penyiaran radio dan TV terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);
24. Belum optimalnya penggunaan Sertifikat Elektronik/Digital pada proses Pengadaan Secara Elektronik;
25. Belum optimalnya pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan, keamanan informasi dan kapasitas layanan LPSE;
26. Belum meratanya pemahaman *stakeholder* dalam memahami Sistem Informasi *e-procurement*;

27. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang kominfo, statistik, dan persandian;
28. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-hambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, adalah :

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta

tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
2. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan. Kerja-

sama yang mengikat keterpaksaan, ketergantungan, dan merugikan Jawa Tengah baik secara langsung maupun tidak langsung, serta jangka pendek maupun jangka panjang harus ditolak dengan tegas.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melintasi batas. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya.

Prinsip Berdikari adalah juga membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Jalan untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri mereka secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan mereka.

Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergis. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.

Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (*equal*) bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 tersebut ditetapkan 11 (sebelas) Program Unggulan, yaitu :

1. Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
3. Memperkuat Sistem Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan Desa Mandiri;
5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Rakyat Sehat;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;

9. Pembangunan Infrastruktur;
10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;
11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama dua tahun ke depan.

Tabel 3.1
Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Jawa Tengah 2013-2018

NO	FUNGSI DISKOMINFO/UPT	MISI JATENG 2013-2018	PROG UNGGULAN JATENG 2013-2018
1	Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.	<p>Misi 1 Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Budaya.</p> <p>Misi 2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.</p> <p>Misi 3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “<i>Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>”.</p> <p>Misi 7 Peningkatan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.</p>	<p>Program Unggulan 3 Menguatkan Sistem Pelayanan Publik</p> <p>Program Unggulan 9 Pembangunan Infrastruktur</p>

NO	FUNGSI DISKOMINFO/UPT	MISI JATENG 2013-2018	PROG UNGGULAN JATENG 2013-2018
2	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sani di antar Perangkat Daerah.	<p>Misi 3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “<i>Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>”.</p> <p>Misi 5 Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.</p>	
3	Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengawasan isi siaran serta kerjasama dan pengembangan lembaga penyiaran.	<p>Misi 2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.</p> <p>Misi 5 Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.</p>	

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah;
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator pemanfaatan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/seksi/subbagian;
- d. Belum memadai dalam hal sarana dan prasarana pendukung kinerja.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015 – 2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015 – 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program *Universal Service Obligation* (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;

5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015 – 2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus ditenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review

terhadap RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.

Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah selama 2 tahun yang akan datang (2017-2018) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RPJMD Perubahan 2013-2018, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Jawa Tengah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;

2. Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran informasi yang berkualitas;
3. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
4. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
5. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 adalah :

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2017 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan sasaran : Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah dengan sasaran : meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.
- 3) Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah dengan sasaran : Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	a. Pengembangan teknologi informasi dan media komunikasi publik.	9 aplikasi 7 layanan	9 aplikasi 7 layanan
			b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola teknologi informasi dan media komunikasi publik.	1.020 org	1.960 org
2.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dan valid.	6 sektor	6 sektor
3.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	a. Jumlah implementasi keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	48 OPD	48 OPD
			b. Peningkatan kapasitas SDM bidang persandian dan keamanan informasi.	-	84 org

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Diskominfo merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan teknologi informasi dan media komunikasi publik sesuai dengan perkembangan terbaru. b. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengelolaan teknologi informasi dan media komunikasi publik. c. Sosialisasi SOP pengelolaan teknologi informasi dan media komunikasi publik. 	Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.
2.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan SDM pengelola data statistik sektoral. b. Pemanfaatan teknologi informasi (<i>Single Data System</i>) dalam rangka integrasi data statistik sektoral. 	Penyelenggaraan pelayanan data statistik sektoral sesuai dengan kewenangan daerah.
3.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi keamanan informasi berstandar internasional. b. Peningkatan pemanfaatan persandian daerah pada kegiatan-kegiatan strategis. c. Pengelolaan audit teknologi informasi dalam rangka peningkatan keamanan informasi. 	Peningkatan kualitas persandian dan keamanan informasi yang akuntabel.

Adapun keterkaitan antara Tujuan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Keterkaitan Tujuan Diskominfo Tahun 2017 – 2018
Terhadap Misi Jawa Tengah 2013 – 2018

NO	TUJUAN DISKOMINFO	MISI JATENG 2013-2018
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	<p>Misi 1 Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Budaya.</p> <p>Misi 2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.</p> <p>Misi 7 Peningkatan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.</p>
2	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.	<p>Misi 5 Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.</p>
6	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	<p>Misi 3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “<i>Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>”.</p>

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jawa Tengah 2013 – 2018 melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 2 (dua) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Diskominfo menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 – 2018, yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kominfo di Dalam dan Luar Daerah;
 - b. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:

Pemeliharaan gedung kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, kendaraan dinas, meubelair serta peningkatan sarana dan prasarana.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:

Pendidikan dan pelatihan formal.
- 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika.

- 6. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media**, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Peningkatan Kualitas Penyiaran di Daerah.
- 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Peningkatan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi;
 - b. Peningkatan Daya Saing Daerah dari Dukungan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi.
- 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**, dengan fokus kegiatan pada:

Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
- 9. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi**, dengan fokus kegiatan pada :

Pengelolaan dan Analisis Pendapat Umum di Jawa Tengah.
- 10. Program Peningkatan Persandian Daerah**, dengan fokus kegiatan pada :

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Dalam Pemanfaatan Keamanan Informasi serta Persandian Daerah.
- 11. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika**, dengan fokus kegiatan pada :

Peningkatan Pengelolaan Teknologi Informasi Lingkup Provinsi Jawa Tengah.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Diskominfo Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	Belanja										
				Belanja Tidak Langsung										
				Belanja Langsung										
EXBAU	-	-	-	1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Tercapainya Pelaksanaan Surat-Menyurat, Sumberdaya Air dan Listrik, ATK, Cetak dan Penggandaan, Makan dan Minum, Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	-	100%	13.112,13	100%	15.934	100%	29.046,13	Sekretariat	
				1.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Terlayannya Jasa Surat Menyurat.	-	12 bln	26,4	12 bln	45	24 bln	71,4	Sekretariat	
				2.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet.	-	12 bln	9.485,74	12 bln	15.773,05	24 bln	25.218,79	Sekretariat	
				3.Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah.	Tersedianya Jaminan Terhadap Barang Milik Daerah.	-	12 bln	65	12 bln	173,35	24 bln	238,35	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				4.Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas.	Jasa Kebersihan Kantor, Angkut Sampah dan Retribusi Sampah.	-	12 bln	37,5	12 bln	9	24 bln	46,5	Sekretariat	
				5.Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Diskominfo.	-	12 bln	166,5	12 bln	674,552	24 bln	841,052	Sekretariat	
				6.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.	-	12 bln	210	12 bln	425,438	24 bln	635,438	Sekretariat	
				7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	-	12 bln	26,25	12 bln	129,646	24 bln	155,896	Sekretariat	
				8.Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Memadai.	-	12 bln	30,937	12 bln	314,133	24 bln	345,07	Sekretariat	
				9.Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya Bahan Bacaan.	-	12 bln	17,108	12 bln	45,6	24 bln	62,708	Sekretariat	
				10.Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jamuan Makan dan Minum yang Memadai.	-	12 bln	97,5	12 bln	261,204	24 bln	358,704	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				11.Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah.	Terkoordinasi Kegiatan Sektor Kominfo melalui Rapat-Rapat serta Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah.	-	12 bln	767,32	12 bln	2.689,31	24 bln	3.456,63	Sekretariat	
				12.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran, Honorarium Tenaga Non PNS, KPID dan PBB.	-	12 bln	2.166,875	12 bln	2.960,088	24 bln	5.126,963	Sekretariat	
				13. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi.	Publikasi dan Dokumentasi yang Baik.	-	12 bln	15	12 bln	15	24 bln	30	Sekretariat	
				2.Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/Kantor, Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.	-	100%	2.028,563	100%	2.281	100%	4.309,563	Sekretariat	
				1.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.	Pemeliharaan Gedung Diskominfo, KIP, KPID, LPSE dan Data Center.	-	12 bln	750	12 bln	1.280	24 bln	2.030	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				2.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Lingkungan Kerja yang Representatif dan Nyaman.	-	12 bln	112,5	12 bln	172,5	24 bln	285	Sekretariat	
				3.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair.	Peralatan Kerja yang Layak Pakai.	-	12 bln	18,75	12 bln	25,75	24 bln	44,5	Sekretariat	
				4.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor.	-	12 bln	467,52	12 bln	796,878	24 bln	1.264,398	Sekretariat	
				5.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.	-	12 bln	179,793	12 bln	403,561	24 bln	583,354	Sekretariat	
				6.Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor.	Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Komunikasi, Alat Studio, Peralatan dan Mesin, Alat Penyimpanan Kantor, Alat Pendingin, Pengadaan Komputer, Pengadaan Alat Keamanan, Server dan Perlindungan.	-	12 bln	500	4 paket sarpras dan 2 unit AC	3.405,861	12 bln 2017 serta 2018	3.905,861	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				7.Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Tersedianya kendaraan dinas/operasional diskominfo yang memadai.	-	-	-	4 mobil. 2 motor.	1.264,6	4 mobil. 2 motor.	1.264,6	Sekretariat	
				8.Kegiatan pengadaan mebelair.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor yang memadai.	-	-	-	1 paket	411,461	1 paket	411,461	Sekretariat	
				9.Kegiatan pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor/aparaturn pemerintah.	Tersedianya lift gedung kantor Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	1 unit lift	1.200	1 unit lift	1.200	Sekretariat	
				3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya.	-	100%	45	100%	47	100%	92	Sekretariat	
				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pakaian PDH beserta Perlengkapannya. • Jumlah kebutuhan pakaian dinas 	-	135 set	45	1 paket	247,433	135 set 1 paket	292,433	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Terlaksananya Diklat dan Bintek Aparatur.	-	100%	75	100%	100	100%	175	Sekretariat	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Pelaksanaan diklat/kursus aparatur Diskominfo Prov. Jateng.	-	15 org	75	16 org	230	41 org	305	Sekretariat	
				5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.										
				Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD.	Laporan kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	1 paket	300	1 paket	500	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	a. Pengembangan teknologi informasi dan media komunikasi publik.	-	1.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa.	Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra).	11 kab/kota	5 kab/kota	8.805	6 kab/kota	9.075	35 kab/kota	48.889,376	Bidang IKP	
				1.Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi.	Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang Dikoordinasikan Jejaring Pengelolaan, Pelayanan Data Informasi dan Dokumentasi.	-	48 SKPD dan 35 Kab/Kota	420	48 SKPD dan 35 Kab/Kota	2.749,875	48 SKPD dan 35 Kab/Kota	3.169,875	Bidang E-Gov	
				2.Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Jateng <i>OnLine</i> .	Terfasilitasinya Layanan Internet dan Intranet, Terkelolanya Sistem Informasi Jateng <i>Online</i> , Terkelolanya <i>Data Canter</i> , Terintegrasinya Sistem Informasi.	-	12 bln	4.700	12 bln	7.300	24 bln	12.000	Bidang TIK	
				3.Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bidang Penyiaran.	Terselenggaranya Penghargaan Penyiaran.	-	1 keg	295	1 keg	390	2 keg	685	Set KPID	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				4.Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi.	a. Jumlah Kebijakan Dan Hasil Pembangunan Yang Dipublikasi Melalui Baliho.	-	5 paket	1.520	5 paket	3.800,653	10 paket	5.320,653	Bidang IKP	
					b. Jumlah Kebijakan dan Hasil Pembangunan yang Dipublikasi melalui <i>Blow-Up</i> .	-	10 paket		10 paket		20 paket			
					c. Jumlah Foto Hasil Pembangunan yang Dipublikasikan.	-	2.500 lembar		-		2.500 lembar			
					d. Jumlah Kebijakan Dan Hasil Pembangunan Yang Dipublikasi Melalui Siaran Langsung di Televisi.	-	4 paket		4 paket		8 paket			
				5.Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi.	a. Jumlah PPID Pembantu Dilingkungan Setda yang Dikoordinasikan Jejaring Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi serta Dokumentasi.	-	8 biro	140	-	250	8 biro setda	390	Bidang Statistik	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
					b. Jumlah PPID Pembantu Lembaga Non Struktural yang Dikoordinasikan Jejaring.	-	2 lembaga non struktural	-		2 lembaga non struktural				
					c. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Terlayani.	-	6 informasi	-		6 informasi				
					d. Jumlah Informasi Pembangunan yang Dipublikasikan.	-	36 informasi	-		36 informasi				
					e. Tersedianya data dan informasi/berita daerah se-Jawa Tengah.		-	559 berita		559 berita				
				6.Kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra).	Jumlah kabupaten/kota yang membentuk FK-Metra.	-	5 kab/kota	200	10 kab/kota	380,575	15 kab/kota	580,575	Bidang IKP	
				7.Kegiatan Pembuatan Buletin/Majalah/Tabloid.	Buletin/Majalah/Tabloid	-	41.000 Eksemplar	450	-	-	41.000 Eksemplar	450	Bidang IKP	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				8.Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.	Terselenggaranya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Diskominfo Prov. Jateng.	-	-	-	12 bln	650	12 bln	650	Sekretariat	
				9.Kegiatan Literasi Media Di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa.	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Khususnya Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Masyarakat Dalam bidang Penyiaran yang Sehat dan Bermartabat.	-	20 keg (2.000 org)	175	3.000 org	250	5.000 org	425	Set KPID	
				2.Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	a. Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.	68,55	95	4.740,5	100	5.000	100	35.330,71	Set KPID	
					b. Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran.	100	100		100		100		Set KPID	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					c. SKPD bidang kominfo yang melakukan sosialisasi kebijakan nasional.	3	3		3		3		Bidang IKP	
				1.Kegiatan Sinkronisasi dan koordinasi bidang kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	a. Jumlah Forum Kehumasan yang Dikoordinasikan Kelembagaannya.	-	80 forum/ lembaga	172	84 forum/ lembaga	184,4	84 forum/ lembaga	356,4	Bidang IKP	
					b. Jumlah Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan yang Disosialisasikan.	-	2 kebijakan		-		2 kebijakan			
				2.Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah.	Jumlah Kebijakan, Program dan Hasil Pembangunan PUG yang Dipublikasikan melalui Televisi dan Radio.	-	5 paket (3 kebijakan)	112,5	3 kebijakan	114,9	5 paket dan 3 Kebijakan	227,4	Bidang IKP	
				3.Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat.	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi LKM/ KIM Dalam Rangka Meningkatkan Peran Dalam Diseminasi Informasi.	-	2 Sosialisasi (2 keg)	100	2 keg	113,034	4 keg	213,034	Bidang IKP	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				4.Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan melalui Ormas/LSM dan OPP.	Sosialisasi Kebijakan dan Hasil-Hasil Pembangunan di Jawa Tengah.	-	3 kali (210 org)	125	210 org	125	420 org	250	Bidang IKP	
				5.Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.	Penyelesaian Sengketa Informasi.	-	12 bln (100%)	1.800	100%	2.500	100%	3.800	Bidang Statistik	
				6.Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/Spot.	Jumlah Kebijakan, Program dan Hasil Pembangunan yang Dipublikasikan melalui Televisi dan Radio.	-	24 paket televisi dan 15 paket radio (39 media)	876	63 media	2.381,979	102 media	3.257,979	Bidang IKP	
				7.Kegiatan Pengembangan Media Center.	<ul style="list-style-type: none"> •Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat melalui <i>Media Center</i>. •Jumlah layanan informasi melalui media center. 	-	100 berita	200	100 berita	246,149	200 berita	446,149	Bidang IKP	
				8.Kegiatan Dialog Interaktif di Radio/Televisi tentang Isu-Isu Penyiaran.	Terlaksananya Dialog Interaktif di Radio atau Televisi tentang Isu-Isu Strategis Bidang Penyiaran.	-	15 keg	140	15 keg	210	30 keg	350	Set KPID	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				9.Kegiatan Pengawasan isi Siaran Lembaga Penyiaran.	Terlaksananya pengawasan lembaga penyiaran.	-	60 Lemb Penyiaran	175	60 Lemb Penyiaran	235	120 Lemb Penyiaran	385	Set KPID	
				10.Kegiatan Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah.	Terlaksananya Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah.	-	12 bln	280	12 bln	457,54	24 bln	737,54	Set KPID	
				11.Kegiatan Proses Perizinan Lembaga Penyiaran.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Lembaga Penyiaran dan Terselenggaranya Diseminasi Bidang Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran di Jawa Tengah.	-	60 Lemb Penyiaran	430	60 Lemb Penyiaran	600	120 Lemb Penyiaran	1.030	Set KPID	
				12.Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau isi Siaran yang telah terbentuk.	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Pemantau Isi Siaran Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Isi Siaran.	-	3 keg (35 kelompok)	180	35 kelompok	366	35 kelompok	546	Set KPID	
				13.Kegiatan Kajian dan Analisa Hasil Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah.	Terlaksananya kegiatan kajian dan analisis hasil pemantauan penyiaran Jawa Tengah.	-	10 keg (10 kajian)	150	10 kajian	250	20 kajian	400	Set KPID	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				3.Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi.	Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo.	5	3	710	3	850	19	9.678,185	Bidang IKP	
				1.Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum.	Jumlah saran, masukan dan kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dari hasil analisa berita aktual yang dirangkum dari berbagai media cetak.	-	3 saran/masukan/kebijakan	450	3 saran/masukan/kebijakan	490,813	6 saran/masukan/kebijakan	940,813	Bidang IKP	
				2.Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah.	Jumlah Issue yang Diangkat Dalam Dialog Pengelolaan Pendapat Umum.	-	3 issue	110	3 issue	120,701	6 issue	230,701	Bidang IKP	
				4.Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan LPSE dlm Pengadaan Barang dan Jasa.	100	100	1.400	100	1.500	100	11.079,537	LPSE	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				1.Kegiatan Layanan Sistem LPSE.	Terkelola, Terfasilitasi dan Terlaksananya Pengadaan Barang Secara Elektronik.	-	12 bln	700	12 bln	1.182	24 bln	1.882	LPSE	
				2.Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Media Massa.	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat.	-	12 bln	350	-	-	12 bln	350	Bidang IKP	
				3.Kegiatan Pengembangan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah	Terlaksananya Diseminasi Informasi melalui Kegiatan Layar Tancap dan Pentas Kesenian.	-	2 keg	50	12 keg	400,625	14 keg	450,625	Bidang IKP	
				4.Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah OPD Prov Jateng yang dapat Melaksanakan UU KIP sesuai ketentuan. Terbentuknya komisioner KIP. 	-	2 Sosialisasi/ Bintek/ Rakor (48 OPD, 35 kab/kota)	200	48 OPD, 35 kab/kota	1.000	48 OPD, 35 kab/kota.	1.200	Bidang Statistik	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
		b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola teknologi informasi dan media komunikasi publik.	-	1.Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.	Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi.	-	100	750	100	750	100	1.500	E-Gov	
				Kegiatan Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika.	Meningkatnya SDM IT OPD Prov dan OPD kab/kota Jateng.	-	12 bln (800 org)	750	950 org	1.536	1.750 org	2.286	E-Gov	
				2.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa.	Jumlah kab/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra).	11 kab/kota	5 kab/kota	8.805	6 kab/kota	9.075	35 kab/kota	48.889,376	Bidang IKP	
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas/ Kualitas SDM Bidang Penyiaran.	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Penyiaran.	-	6 keg (300 org)	265	300 org	505	600 org	770	Set KPID	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dan valid.	-	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi :		1800		2.132		9.403,85	Bidang Statistik		
					a. JDA	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok					
					b. PDRB Provinsi	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok					
					c. Tabel I-O	-	-	-	1 dok					
				d. Tinjauan PDRB Kab/Kota	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok						
				Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.	a. Tersedianya Data Survey Urusan Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM.	-	100 buku	1.300	-	2.354,067	100 buku	3.654,067	Bidang Statistik	
					b. Tersedianya Data Hasil Kompilasi Produk Administrasi Urusan Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM.	-	100 buku		-		100 buku			
c. Tersedianya Hasil Informasi Kebijakan Dalam Menunjang Tata Pemerintahan yang Baik.	-	12 bln			-		12 bln							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					d. Pelayanan Informasi Publik.	-	12 bln		12 bln		24 bln			
					e. Tersedianya data statistik sektoral di Jawa Tengah.		-		6 sektor		6 sektor			
Tujuan 3: Meningkatkan Keamanan Informasi dan Pemanfaatan Persandian Daerah.	Meningkatnya Keamanan Informasi dan Pemanfaatan Persandian Daerah.	Jumlah Implementasi Keamanan Informasi dan Persandian.	-	Program Peningkatan Persandian Daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Pengamanan Informasi dan Persandian.	-	100	150	100	250	100	350	Bidang Persandian dan KI	
				Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Persandian.	Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Keamanan Informasi.	-	48 OPD	150	48 OPD	2.859,17	24 bln	3.009,17	Bidang Persandian dan KI	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada

saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja OPD Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan saran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 6.1
Kinerja Diskominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi.	100	100	100	100

Sumber: Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.